



Perwakilan Biro Pusat Statistik
KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Rungkut, Surabaya
Telepon : 811735, 813326, 813611, 813673, 819343

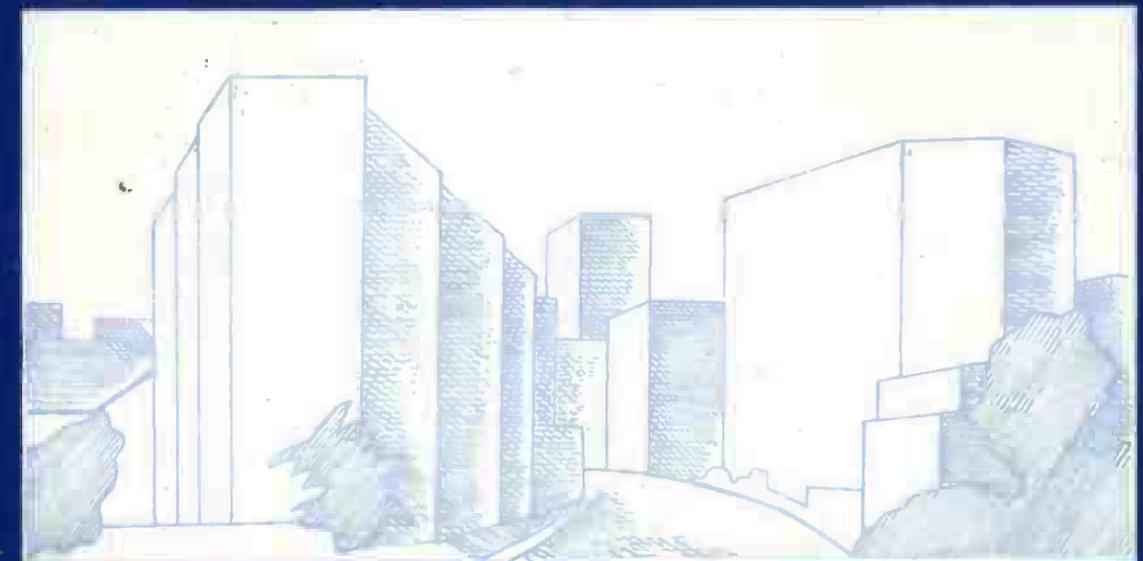
LABEL SEMENTARA SENSUS BARANG 2014			
Ruang	ID	Lotus	Petugas
B2102	123.0191.3500-1	GB 16	SM



ISBN: 979.487.258.X
35532.9107

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kotamadya) Propinsi Jawa Timur 1986/1987 - 1988/1989

SERI A



www.bps.go.id
<http://www.bps.go.id>

REPLIK
TARIK BENCORAK DAN 2
DOKUMENTASI STATISTIK
BIRO PUSAT STATISTIK

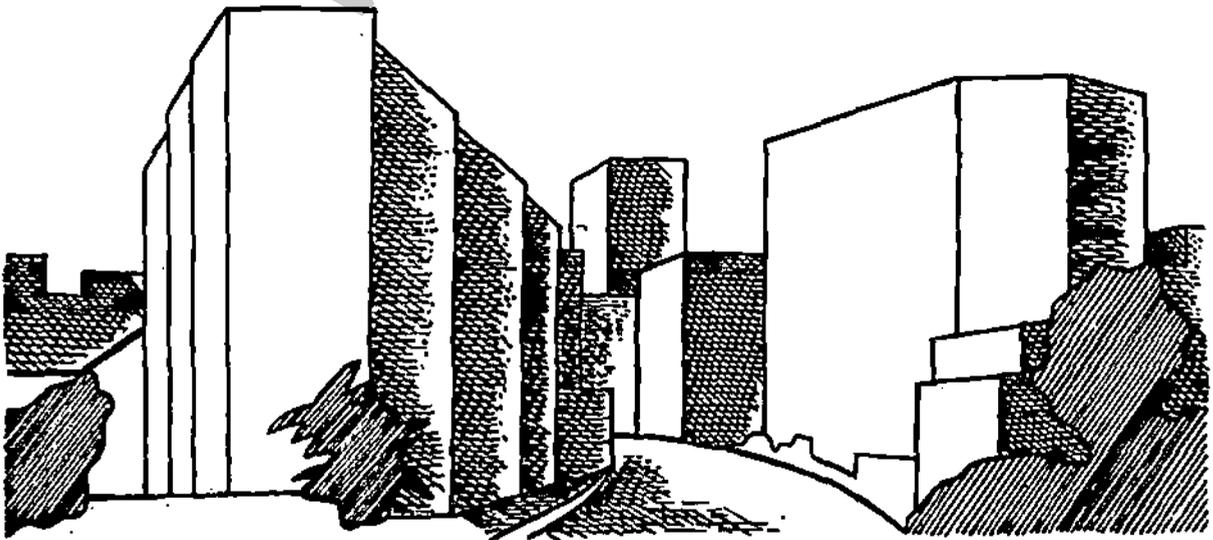
Septiana



ISBN: 979.487.258.X
35532.9107

**Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kotamadya)
Propinsi Jawa Timur
1986/1987 - 1988/1989**

SERI A



KANTOR STATISTIK



PROPINSI JAWA TIMUR

Kata Pengantar

Data Keuangan Pemerintah merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menggerakkan roda pembangunan. Oleh karenanya dirasa perlu untuk menerbitkan publikasi statistik keuangan daerah tingkat II se-Jawa Timur.

Isi publikasi ini meliputi realisasi penerimaan baik yang bersumber dari anggaran rutin maupun pembangunan, demikian pula realisasi pengeluarannya. Publikasi ini merupakan publikasi yang kelima yang disajikan tahunan mulai tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 1988/1989.

Untuk memenuhi tuntutan para pemakai data dan penyesuaian karakteristik data yang dikumpulkan, pada publikasi ini banyak perubahan yang disesuaikan dengan rincian kwesioner terbaru. Demikian pula nampak terdapat beberapa rincian data yang tidak langsung dapat dikaitkan dengan periode sebelumnya, akibat adanya perbedaan rincian sumber keuangan di pemerintah daerah.

Buku publikasi ini terbagi menjadi 2 seri :

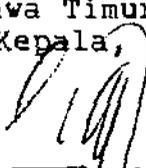
- Seri A merupakan ringkasan tentang konsep, definisi dan ulasan keuangan pemerintah daerah secara singkat.
- Seri B perkembangan keuangan per Daerah Tingkat II.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pendataan dan penerbitan publikasi ini.

Kritik dan saran kami harapkan untuk menyempurnakan penerbitan selanjutnya.

Surabaya, Pebruari 1991

Kantor Statistik Provinsi
Jawa Timur
Kepala,



SOETOPO MARTOWARDOYO, M.Sc
NIP : 34000541

Daftar isi

U r a i a n	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Penjelasan singkat	iii - xi
Ulasan	xii - xvi
Selisih Antara Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II Seluruh Jawa Timur	1 - 3
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II Se Jawa Timur	4 - 6
Gambar Grafik	7 - 10

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

I KEGUNAAN .

- a. Penyusunan statistik Keuangan Daerah antara lain adalah untuk keperluan penghitungan regional income. Juga sebagai komponen besar dalam penghitungan pendapatan nasional, tabel input output setelah digabung dengan data keuangan pemerintah pusat.
- b. Dengan adanya statistik keuangan daerah, dapat pula diketahui potensi atau kemampuan masing-masing daerah menggali sumber-sumber keuangannya. Dengan kata lain, dari Statistik Keuangan Daerah dapat diketahui sumber-sumber keuangan yang baru
- c. Sebagai bahan bagi pemerintah pusat untuk menentukan besarnya bantuan yang perlu diberikan untuk masing-masing daerah, atau sektor-sektor apa yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
- d. Oleh karena Pengeluaran Pembangunan Pemerintah merupakan komponen yang ikut menentukan seluruh pembentukan modal (Capital Formation) maka peranan statistik keuangan daerah amat penting artinya.

II RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup pengumpulan data statistik Keuangan Pemerintah daerah dibedakan antara:

- a. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) dikumpulkan dari setiap daerah tingkat I di Indonesia, kecuali Daerah Tingkat I Timor Timur sehingga pengumpulan data statistik keuangan pemerintah daerah tingkat I dilakukan secara lengkap (complete anumeration).
- b. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dikumpulkan di seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia sebanyak 287 daerah (tidak termasuk Daerah Tingkat II di Provinsi Timor-Timur) Jadi pengumpulan data statistik keuangan daerah tingkat II dilaksanakan secara lengkap (complete anumeration).
- c. Statistik Keuangan Pemerintah Desa. Berbeda dengan cara pengumpulan data statistik Keuangan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka pengumpulan data statistik keuangan pemerintah desa dilakukan secara sampel. Jumlah contoh desa terpilih untuk seluruh Indonesia sekitar 6.500 desa atau lebih kurang 10% dari seluruh desa.

Pemerintah Desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan otonom. Dan desa adalah unit pemerintah satu tingkat di bawah kecamatan. Pencatatan data keuangan daerah dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Berbeda dengan tahun kalender yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, maka tahun anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya.

III JENIS DAFTAR YANG DIGUNAKAN.

Daftar K2 adalah daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data statistik keuangan pemerintah daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya) dan terdiri atas 2 tabel. Tabel pertama memuat Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan tabel 2 memuat Pencatatan Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II yang dibagi atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Sumber data, Bagian Keuangan Kantor Bupati atau wali kota setempat. Daftar K2 ini diisi oleh Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya dan setelah diisi harus disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Sekwilda atau Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota. Setelah data K2 diperiksa dan diteliti kebenarannya, oleh Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya dikirim ke Kantor Statistik Provinsi dan selanjutnya Kantor Statistik provinsi tingkat mengirimkannya ke Biro Pusat Statistik.

IV KONSEP DAN DEFINISI UNTUK PENDATAAN.

Daftar K2 diperuntukkan bagi pengisian penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya) Jenis penerimaan meliputi pajak-pajak daerah tingkat II, Retribusi Daerah, Penerimaan dari dinas-dinas, Bagian laba badan usaha milik daerah dan penerimaan lainnya.

A. REALISASI PENERIMAAN DAERAH OTONOM TINGKAT II SELURUH JAWA TIMUR.

PENERIMAAN DAERAH.

1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.

Adalah suatu jumlah taksiran kelebihan dana yang berguna untuk mendukung proyek-proyek lanjutan dari tahun anggaran yang telah lalu.

2. BAGIAN PENERIMAAN ASLI DAERAH.

Bagian penerimaan asli daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah di dalam menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah sendiri.

2.1 Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

2.2 Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik penda bersangkutan bagi yang berkepentingan.

2.3 Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.

Penerimaan ini berupa bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas.

Penerimaan dari dinas-dinas merupakan penerimaan daerah daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2.5 Penerimaan lain-lain.

Penerimaan di luar item 2.1. s.d 2.4 seperti hasil penjualan milik daerah penerimaan jasa giro.

3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK.

3.1 Bagi Hasil Pajak.

Terdiri dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan pajak lainnya.

3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak.

Penerimaan bagi hasil bukan pajak misalnya Iuran Hasil Hutan (IHH), Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), dan sumbangan rehabilitasi cengkeh (SRC) dan sebagainya.

4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.

4.1 Sumbangan.

Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pada tingkat I serta sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan.

4.2 Ganjaran.

Ganjaran adalah penerimaan pada tingkat II yang berasal dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi dan semata-mata diperuntukkan bagi kegiatan rutin non belanja pegawai dalam penyelenggaraan tugas pemerintah umum di daerah.

4.3 Bantuan.

Sudah cukup jelas. Misalnya Bantuan Pembangunan Tingkat I adalah Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerah tingkat I tetapi dialokasikan atau diarahkan pada daerah tingkat II tertentu.

Bantuan Penghijauan Reboisasi adalah bantuan pembangunan yang diberikan untuk pelaksanaan penghijauan dan reboisasi.

B. REALISASI PENGELUARAN DAERAH OTONOM TINGKAT II.

01. PENGELUARAN RUTIN.

1. Belanja Pegawai.

Yang termasuk dalam belanja pegawai yaitu: Gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan beras, honorarium dan vakasi, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya perawatan dan pengobatan lokal yang semuanya dibayarkan kepada pegawai daerah otonom.

2. Belanja barang.

Perincian ini terdiri dari ongkos kantor yang meliputi: alat-alat tulis kantor, barang cetakan, pakaian kerja, pengamanan kantor dan rumah jabatan, jasa perkantoran, langganan listrik, telepon, air minum dan gas, sewa gedung dan kepanitiaan lainnya.

Juga termasuk dalam belanja barang yaitu: Pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, biaya pakaian dinas, pembelian peralatan dokter, alat-alat perlengkapan laboratorium, inventaris ruangan pasien, perlengkapan dapur rumah sakit, dan sebagainya.

3. Biaya Pemeliharaan.

Biaya pemeliharaan meliputi: pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, asrama, mess, kendaraan dinas KDH dan wakil KDH, kendaraan dinas lainnya, pemeliharaan inventaris kantor dan sebagainya.

4. Belanja Perjalanan Dinas.

Yang termasuk dalam Biaya perjalanan dinas yaitu: perjalanan dinas, perejalanan dinas tetap, perjalanan pindah, dan pemulangan pegawai yang pensiun.

5. Belanja Lain-lain.

Yang termasuk dalam belanja lain-lain misalnya: uang insentip, biaya operasional, biaya propaganda dan sebagainya yang umumnya sudah baku dalam APBD

6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.

Yang dimaksud adalah pembayaran pinjaman dan bunga baik secara cicilan maupun keseluruhan.

02 PENGELUARAN PEMBANGUNAN.

Pengeluaran pembangunan pada hakekatnya adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembayaran proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Pengeluaran yang dicantumkan dalam pengeluaran pembangunan ini yaitu :

1. Pertanian dan Pengairan.
2. Industri.
3. Pertambangan dan Energi.
4. Perhubungan dan Pariwisata.
5. Perdagangan dan Koperasi.
6. Tenaga kerja dan Pemukiman kembali.
7. Pembangunan dan Daerah.
8. A g a m a.
9. Pendidikan Generasi Muda.
10. Kesehatan.
11. Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
12. H u k u m.
13. Keamanan dan Ketertiban Umum.
14. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial.
15. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian.
16. Aparatur Pemeritah.
17. Pengembangan Dunia Usaha.
18. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
19. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.
20. Pembayaran Kembali Pinjaman.

V CARA MEMBACA TABEL.

Umum

01. Sel yang berisi angka (numerik) berupa nol (0) bila benar-benar perincian ini kosong, dan pada daftar tetap ditanyakan.
02. Sel yang berisi strip (-) pada sel ini memang tidak ditanyakan pada tahun yang bersangkutan tetapi ditanyakan pada tahun yang lain.
03. Bagian Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988 dimasukkan rincian 2a. (Pajak Daerah) pada tahun anggaran 1988/1989 dimasukkan rincian 2b. (Retribusi Daerah).

A. TAHUN 1986/1987 DAN 1987/1988.

Realisasi Penerimaan.

01. Pajak-pajak lainnya pada rincian 2 meliputi.
 - Pajak tontonan.
 - Pajak Perusahaan.
 - Opsen atas pajak.
 - Pajak-pajak lainnya.
02. Retribusi daerah pada kedua tahun anggaran ini tidak di perinci lebih lanjut.
03. Bagian bagi hasil pajak/bukan pajak, tidak di tanyakan.
04. Bagian sumbangan dan bantuan, diperinci tetapi tidak seluas pada tahun lainnya.

Realisasi Pengeluaran.

Pengeluaran Pembangunan.

Diperinci tetapi tidak seperti pada tahun terakhir (1988/1989). Dalam Publikasi ini tahun terakhir sebagai acuan.

B. TAHUN 1988/1989.

Realisasi Penerimaan.

01. Pajak-pajak lainnya pada rincian 2 meliputi :
 - a. Pajak atas ijin menangkap ikan di perairan teritorial.
 - b. Pajak pembikinan/penjualan petasan dan kembang api.

- c. Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol.
- d. Pajak tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kuburan.
- e. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya, tanah kosong yang berbatasan dengan jalan umum didarat atau di air atau terletak di sekitarnya yang mempunyai jalan keluar.
- f. Pajak Rumah bola.
- g. Pajak Forensen.
- h. Pajak Rumah penginapan.
- i. Pajak Kendaraan di atas air.
- j. Pajak Pelabuhan perahu.
- k. Pajak Pembikinan garam.
- l. Pajak Penghitungan garam keluar daerah.
- m. Pajak Asuransi.
- n. Pajak Pengusahaan Kandang sapi.
- o. Pajak Pengambilan sarang burung.
- p. Pajak Pengambilan rumput laut dan agar-agar.
- q. Pajak pengambilan telur penyu.
- r. Pajak Rumah asap.
- s. Pajak mendirikan gudang-gudang tambahan.
- t. Pajak pelelangan ikan.
- u. Pajak balik nama alat angkut di atas air.
- v. Pajak berdiam 120 hari tanpa tempat tinggal lebih besar.
- w. Pajak pembuatan kapal.
- x. Pajak pertambangan bahan galian C.
- y. Penerimaan harga formulir industri kendaraan bermotor.
- z. Pajak langsung.
- aa. Pajak khusus.
- bb. Pajak dari pengusaan meja billyard.
- cc. Pajak dari pengusahaan alat ketrampilan.

- dd. Tunggakan pajak.
- ee. Denda pajak.
- ff. Pajak-pajak lain yang tidak dapat dirinci di atas.

02 Retribusi lainnya pada rincian 2 meliputi:

- a. Pemberian ijin Perusahaan Tambak ikan.
- b. Pemberian ijin pengambilan pasir batu dan batu kerikil.
- c. Pemberian ijin pengambilan dan pembakaran kapur gamping.
- d. Pemberian ijin pengambilan batu karang di laut.
- e. Pengujian kendaraan bermotor.
- g. Uang penambangan/rakit penyebrangan.
- h. Uang penguburan.
- i. Pengerukan, penyedotan kakus.
- j. Pelelangan ikan.
- k. Pengujian kendaraan tidak bermotor.
- l. Reklame, spanduk dan poster.
- m. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.
- n. Bahan galian.
- o. Sumbangan Rehabilitasi prasarana jalan.
- p. Kendaraan air.
- q. Pengeboran air tanah dan pemakai air bukan air tanah.
- r. Pemeriksaan dan pengawasan kulit.
- s. Tusaha pengujian kendaraan bermotor.
- t. Bimbingan industri.
- u. Hasil jasa lelang.
- v. Film dan hiburan/pajak karcis tontonan.
- x. Karantina dan sanitasi.
- y. Pelabuhan.
- z. Ijin Pekerjaan Pemboxongan.

- aa. Wajib uji barang (uji tera).
- bb. Pengeluaran hasil ternak dan unggas.
- cc. Penelitian sertifikat tanah/dari agraria.
- dd. Usaha retribusi kaki lima.
- ee. Retribusi lain yang tidak dapat dirinci di atas.

03. Rincian pinjaman, persewaan, penerimaan Ipeda/Ireda hanya ditanyakan sebelum tahun anggaran 1988/1989.

**ULASAN PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT II
SE JAWA TIMUR.**

Kemajuan Pembangunan di daerah-daerah umumnya sangat tergantung pada kemampuannya didalam menggali/memperoleh sumber-sumber keuangan guna membiayai kebutuhannya.

Semakin potensial suatu daerah akan nampak semakin besar dan ragamnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Timur dapat tercermin pada tabel-tabel yang disajikan dalam 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 1986/1987 sampai tahun 1988/1989 dengan uraian singkat sebagai berikut.

1. Keseimbangan posisi Keuangan.

- a. Dari Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II se Jawa Timur, yang berturut-turut menunjukkan Rp. 191.727,- (juta) dan Rp. 181.297,- (juta), untuk tahun 1986/1987 Rp. 216.747,- (juta) dan Rp. 203.627,- (juta) untuk tahun 1987/1988, sedangkan tahun 1988/1989 penerimaan Rp. 325.107,- (juta) dan pengeluaran Rp. 316.137,- dapat diketahui keseimbangan posisi Keuangan dari tahun ke tahun. Jika ditinjau sifat APBN/APBD yakni keseimbangan yang dinamis, maka pada tahun 1988/1989 lebih mendekati dengan selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 8.970,- (juta) atau 2,76 % dibanding tahun anggaran 1986/1987 yang menunjukkan selisih Rp. 10.430,- (juta) atau 5,44 % dan tahun 1987/1988 sebesar 6,05 % atau Rp. 13.120,- (juta)
- b. Dari uraian pada butir la. apabila dihitung secara global selisih penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah Daerah Tingkat I se Jawa Timur, antara 2,7 - 6,1 %. Pengamatan Realisasi anggaran perkabupaten/kotamadya, selisihnya beragam bahkan ada beberapa Daerah Tingkat II menunjukkan angka negatif (artinya sisi pengeluaran lebih besar dari sisi penerimaan) seperti rincisn berikut ini.

Tahun Anggaran 1986/1987

Pemerintah Daerah Tingkat II	selisih	%
1. Kodya. Kediri] -679 s/d -497	-19 s/d -14
2. Kabup. Lumajang		
1. Kabup. Pamekasan] > -170 s/d -14	-6,5 s/d -0,3
2. " Probolinggo		
3. " Ngawi		
1. Kodya. Surabaya] > 962 s/d 5.997	9 s/d 14
2. kabup. Sampang		
3. " Gresik		

Tahun Anggaran 1987/1988

Pemerintah Daerah Tingkat II	selisih	%
1. Kabup. Pamekasan	-271	-10,31
2. " Ngawi	1.343	25,08
3. " Lamongan	3.143	48,18

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	selisih	%
1. Kabup. Probolinggo	-488	-7,86
2. " Ngawi	-3	-0,04
1. Kabup. Mojokerto	740	11,71
2. " Sidoarjo	1.207	9,36

2. Perbandingan penerimaan antar daerah beragam. Untuk penerimaan terendah dan tertinggi Pemerintah Daerah Tingkat II dapat dilihat sebagai berikut :

a. Penerimaan

- Penerimaan terendah.

Tahun Anggaran 1986/1987

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 1.961,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.144,-
3. Kabup. Sampang	Rp. 2.238,-

Tahun Anggaran 1987/1988

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 1.998,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.117,-
3. " Mojokerto	Rp. 2.417,-

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 2.550,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.745,-
3. " Mojokerto	Rp. 3.259,-

- Penerimaan tertinggi

Tahun Anggaran 1986/1987

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 42.781,-
2. Kabup. Gresik	Rp. 10.094,-
3. " Jember	Rp. 9.647,-

Tahun Anggaran 1987/1988

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 53.198,-
2. Kabup. Gresik	Rp. 11.045,-
3. " Jember	Rp. 9.960,-

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	Penerimaan (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 62.198,-
2. Kabup. Jember	Rp. 16.195,-
3. " Malang	Rp. 15.611,-

b. Pengeluaran Daerah Tingkat II menurut kemampuan

- Pengeluaran Keuangan terendah.

Tahun Anggaran 1986/1987

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 1.841,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.007,-
3. Kabup. Sampang	Rp. 2.017,-
4. Kodya. Mojokerto	Rp. 2.335,-
5. " Probolinggo	Rp. 2.365,-
6. Kabup. Trenggalek	Rp. 2.625,-

Tahun Anggaran 1987/1988

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 1.983,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.094,-
3. Kabup. Sampang	Rp. 2.377,-
4. Kodya. Mojokerto	Rp. 2.393,-
5. " Probolinggo	Rp. 2.439,-
6. " Madiun	Rp. 2.860,-

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Blitar	Rp. 2.541,-
2. " Pasuruan	Rp. 2.725,-
3. " Mojokerto	Rp. 3.238,-
4. " Probolinggo	Rp. 3.290,-
5. " Madiun	Rp. 3.826,-
6. " Kediri	Rp. 4.098,-

- Pengeluaran Keuangan tertinggi

Tahun Anggaran 1986/1987

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 36.784,-
2. Kabup. Jember	Rp. 9.272,-
3. " Gresik	Rp. 9.132,-
4. Kodya. Malang	Rp. 7.854,-
5. Kabup. Malang	Rp. 6.805,-
6. " Banyuwangi	Rp. 6.297,-

Tahun Anggaran 1987/1988

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 50.474,-
2. Kabup. Gresik	Rp. 10.016,-
3. " Jember	Rp. 9.385,-
4. Kodya. Malang	Rp. 8.376,-
5. Kabup. Malang	Rp. 7.732,-
6. " Sidoarjo	Rp. 7.037,-

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 59.815,-
2. Kabup. Jember	Rp. 16.128,-
3. " Malang	Rp. 15.589,-
4. " Sidoarjo	Rp. 11.697,-
5. " Banyuwangi	Rp. 11.613,-
6. Kodya. Malang	Rp. 11.328,-

c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi daerah otonom tingkat II se Jawa Timur, Bagian laba Badan Usaha milik Negara (B U M N) adanya kenaikan dari tahun ke tahun, dimana tahun anggaran 1986/1987 s/d 1988/1989 Rp. 3.145,- juta, Rp. 3.223,- juta menjadi Rp. 4.729,- juta.

d. Penerimaan dari dinas-dinas.

Tahun 1986 s/d 1987 Rp. 3.438,- juta.

Tahun 1987 s/d 1988 Rp. 3.659,- juta.

Tahun 1988 s/d 1989 Rp. 4.854,- juta.

e. Penerimaan lain-lain.

Tahun 1986 s/d 1987 Rp. 4.687,- juta.

Tahun 1987 s/d 1988 Rp. 5.198,- juta.

Tahun 1988 s/d 1989 Rp. 5.852,- juta.

Tahun Anggaran 1988/1989

Pemerintah Daerah Tingkat II	Pengeluaran (Juta)
1. Kodya. Surabaya	Rp. 59.815,-
2. Kabup. Jember	Rp. 16.128,-
3. " Malang	Rp. 15.589,-
4. " Sidoarjo	Rp. 11.697,-
5. " Banyuwangi	Rp. 11.613,-
6. Kodya. Malang	Rp. 11.328,-

c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi daerah otonom tingkat II se Jawa Timur, Bagian laba Badan Usaha milik Negara (B U M N) adanya kenaikan dari tahun ke tahun, dimana tahun anggaran 1986/1987 s/d 1988/1989 Rp. 3.145,- juta, Rp. 3.223,- juta menjadi Rp. 4.729,- juta.

d. Penerimaan dari dinas-dinas.

Tahun 1986 s/d 1987 Rp. 3.438,- juta.
 Tahun 1987 s/d 1988 Rp. 3.659,- juta.
 Tahun 1988 s/d 1989 Rp. 4.854,- juta.

e. Penerimaan lain-lain.

Tahun 1986 s/d 1987 Rp. 4.687,- juta.
 Tahun 1987 s/d 1988 Rp. 5.198,- juta.
 Tahun 1988 s/d 1989 Rp. 5.852,- juta.

REALISASI PENERIMAAN DAERAH OTONOM TINGKAT II
SE JAWA TIMUR

(Dalam Ribuan Rupiah)

PERINCIAN	TAHUN		
	1986/1987	1987/1988	1988/1989
1 Bagian Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu	3 947 459	10 404 930	9 467 218
2 Bagian Pendapatan Asli Daerah	70 263 254	79 725 418	75 675 391
a. Pajak Daerah	31 274 614	31 463 350	14 952 388
- Pajak Potong Hewan	309 134	321 127	407 514
- Pajak Pembangunan I	3 228 002	4 112 725	5 195 396
- Pajak Radio	142 439	154 743	221 953
- Pajak Bangsa Asing	269 566	269 184	344 175
- Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian umum	-	-	5 429 385
- Pajak reklame	844 193	1 026 096	1 296 581
- Pajak Anjing	26 027	26 092	42 525
- Pajak Penjualan Minuman yang mengandung alkohol	18 495	21 141	27 927
- Pajak Kendaraan tak bermotor	323 285	367 658	409 611
- Pajak Penerangan Jalan	190 505	69 455	319 214
- Pajak Pendaftaran Perusahaan	475 353	719 308	757 888
- Pajak-Pajak lainnya	25 447 615	24 375 821	500 219
b. Retribusi Daerah	27 717 661	36 180 152	45 286 711
- Uang Leges	-	-	432 353
- Uang Dispensasi Jalan/Jembatan	-	-	1 471 240
- Uang Penambahan/Rakit Penyeberangan	-	-	42 700
- Uang Pemeriksaan dan /Pembantaian	-	-	426 400
- Uang Sewa Tanah/Bangunan	-	-	340 169
- Uang Sepadan/Ijin Bangunan	-	-	5 954 587
- Uang atas Pemakaian Tanah	-	-	163 940
- Pemberian ijin Perusahaan Perindustrian kecil	-	-	86 110
- Jembatan Timbang	-	-	22 241
- Uang terminal (bus, non bus, taksi)	-	-	1 615 642
- Rumah sakit dan Balai Pengobatan, Puskesmas	-	-	7 276 313
- Tempat Rekreasi	-	-	295 996
- P a s a r	-	-	8 625 673
- Pasangrahan, Losmen, Hotel	-	-	52 759
- Pemeriksaan Susu	-	-	55 467
- Parkir	-	-	992 458
- Sampah/Kebersihan lainnya	-	-	3 866 617
- Sewa Rumah, Gedung, Kost, Pondokan, Asrama	-	-	119 003
- Ijin Usaha Trayek Angkutan	-	-	221 786
- Pengeluaran hasil ternak dan unggas	-	-	96 039
- Agen Pariwisata dan Biro Perjalanan	-	-	2 279
- Administrasi KTP, Surat Jalan, Akte Kelahiran	-	-	636 810
- Penetapan Sertifikat Tanah/dari Agraria	-	-	140 120
- Usaha Retribusi Kaki Lima	-	-	47 468
- Retribusi lainnya	-	-	12 302 541
c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	3 145 314	3 223 758	4 729 032
d. Penerimaan dari Dinas-dinas	3 438 338	3 659 703	4 854 659
e. Penerimaan Lain-lain	4 687 327	5 198 455	5 852 601
JUMLAH RINCIAN 1 DAN 2	74 210 713	90 130 348	85 142 609

REALISASI PENERIMAAN DAERAH OTONOM TINGKAT II
SE JAWA TIMUR

(Dalam Ribuan Rupiah)

P E R I N C I A N	T A H U N		
	1986/1987	1987/1988	1988/1989
3 Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	-	-	37 656 936
a. Bagi Hasil Pajak	-	-	35 692 871
- Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	32 407 573
- Pajak Lainnya	-	-	3 285 298
b. Bagi Hasil Bukan pajak	-	-	1 964 065
- Iuran Hasil Hutan (IHH)	-	-	938 194
- Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah	-	-	432 873
- Bagi bukan Pajak lainnya	-	-	592 998
4 Bagian Sumbangan dan Bantuan	94 949 055	101 348 158	195 575 417
a. Sumbangan	-	-	91 011 515
- Ganjaran	-	-	3 957 010
- Subsidi/Perimbangan Keuangan dai Negara	-	-	83 213 812
- Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (DBPP-SDN)	-	-	111 820
- Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (SDDO-OPD)	-	-	925 994
- Subsidi Bantuan Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek Pariwisata Daerah (SBPP-OPD)	-	-	85 000
- Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	983 387
- Sumbangan lainnya yang belum termasuk pada ayat-ayat diatas	-	-	1 734 492
b. Bantuan	94 949 055	101 348 158	104 563 902
- Bantuan Pembangunan Dati I	-	-	1 725 266
- Bantuan Pembangunan Dati II	-	-	50 221 542
- Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan dati II	-	-	12 667 188
- Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan SD	-	-	15 132 822
- Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan	-	-	7 949 841
- Bantuan Penghijauan dan Reboisasi	-	-	1 147 811
- Bantuan Pembangunan Desa	-	-	9 653 968
- Bantuan dari Pemerintah Pusat	69 500 257	79 325 673	777 063
- Bantuan dari Pemerintah Tingat I	25 448 798	22 022 485	2 106 540
- bantuan lainnya yang belum termasuk ayat-ayat di atas	-	-	3 181 861
5 Pinjaman (Bagian Rutin)	1 045 998	292 361	-
6 Persewaan	273 933	768 376	-
7 Penerimaan Ipeda/Ireda (Bagian Rutin)	1 501 488	3 263 504	-
8 Bagian Penerimaan Pembangunan	19 745 367	20 944 406	6 732 190
T O T A L P E N E R I M A A N	191 726 554	216 747 153	325 107 152

REALISASI PENGELUARAN DAERAH OTONOM TINGKAT II
SE JAWA TIMUR

(Dalam Ribuan Rupiah)

P E R I N C I A N	T A H U N		
	1986/1987	1987/1988	1988/1989
1. Pengeluaran Rutin	137 830 672	149 406 258	157 767 863
a. Belanja Pegawai	86 155 754	92 174 526	89 376 781
b. Belanja barang	17 488 964	21 746 152	23 686 328
c. Belanja Pemeliharaan	7 353 637	9 666 009	12 249 346
d. Belanja Perjalanan Dinas	1 628 955	1 824 460	2 581 830
e. Belanja Lain-lain	-	-	20 452 351
f. Angsuran Pinjaman/ Hutang dan bunga	2 227 046	854 409	2 049 489
g. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada daerah bawahan	1 430 173	1 356 886	966 898
h. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	21 546 143	21 783 816	5 439 298
i. Pengeluaran tidak tersangka	-	-	965 542
2. Pengeluaran Pembangunan	43 466 257	54 220 877	158 369 611
a. Pertanian dan Pengairan	-	-	2 694 721
b. Industri	-	-	58 967
c. Pertambangan dan Energi	-	-	900 633
d. Perhubungan dan Pariwisata	-	-	60 770 991
e. Perdagangan dan Koperasi	-	-	927 842
f. Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali	-	-	108 902
g. Pembangunan Daerah	-	-	28 027 689
h. Agama	-	-	1 186 901
i. Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	-	-	20 179 264
j. Kesehatan, Kesejahteraan dan Keluarga Berencana	-	-	11 125 045
k. Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	-	4 285 923
l. H u k u m	-	-	157 043
m. Keamanan dan Ketertiban Umum	-	-	972 642
n. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial	-	-	240 263
o. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	-	-	1 524 800
p. Aparatur Pemerintah	-	-	13 195 398
q. Pengembangan Dunia Usaha	-	-	3 896 797
r. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	1 405 002
s. Subsidi/Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan	-	-	1 083 561
t. Pembayaran Kembali Pinjaman	-	-	5 627 227
T O T A L P E N G E L U A R A N	181 296 929	203 627 135	316 137 474

SELISIH ANTARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH OTONOM TINGKAT II SELURUH JAWA TIMUR
(Dalam Ribuan Rupiah)

		TAHUN 1986/1987			
DAERAH TINGKAT II		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	%
KABUPATEN PACITAN		4 434 668	4 414 240	20 428	0.46
KABUPATEN PONOROGO		3 332 929	3 270 810	62 119	1.86
KABUPATEN TRENGGALEK		2 655 186	2 625 378	29 808	1.12
KABUPATEN TULUNGAGUNG		3 699 873	3 680 824	19 049	0.51
KABUPATEN B L I T A R		4 082 181	3 999 306	82 875	2.03
KABUPATEN K E D I R I		4 889 310	4 490 599	398 711	8.15
KABUPATEN M A L A N G		6 835 012	6 805 768	29 244	0.43
KABUPATEN LUMAJANG		4 532 226	5 210 846	- 678 620	-14.97
KABUPATEN J E M B E R		9 647 546	9 272 784	374 762	3.88
KABUPATEN BANYUWANGI		6 444 642	6 297 435	147 207	2.28
KABUPATEN BONDOWOSO		3 491 918	3 233 783	258 135	7.39
KABUPATEN SITUBONDO		3 710 993	3 609 232	101 761	2.74
KABUPATEN PROBOLINGGO		3 753 323	3 804 342	-51 019	-1.36
KABUPATEN PASURUAN		4 455 707	4 251 167	204 540	4.59
KABUPATEN SIDOARJO		6 715 697	6 122 421	593 276	8.83
KABUPATEN MOJOKERTO		3 073 250	2 939 987	133 263	4.34
KABUPATEN JOMBANG		4 070 300	3 826 174	244 126	6.00
KABUPATEN NGANJUK		4 413 458	4 247 358	166 100	3.76
KABUPATEN MADIUN		2 852 983	2 643 984	208 999	7.33
KABUPATEN MAGETAN		3 305 403	3 216 673	88 730	2.68
KABUPATEN N G A W I		4 049 675	4 064 155	-14 480	-0.36
KABUPATEN BOJONEGORO		2 781 198	2 706 028	75 170	2.70
KABUPATEN T U B A N		3 144 003	3 039 833	104 170	3.31
KABUPATEN LAMONGAN		3 852 078	3 693 079	158 999	4.13
KABUPATEN G R E S I K		10 094 303	9 132 249	962 054	9.53
KABUPATEN BANGKALAN		2 966 812	2 814 096	152 716	5.15
KABUPATEN SAMPANG		2 238 717	2 017 587	221 130	9.88
KABUPATEN PAMEKASAN		2 632 680	2 803 656	- 170 976	-6.49
KABUPATEN SUMENEP		4 227 212	4 002 874	224 338	5.31
KOTAMADYA K E D I R I		2 567 932	3 065 002	- 497 070	-19.36
KOTAMADYA B L I T A R		1 961 710	1 841 261	120 449	6.14
KOTAMADYA M A L A N G		8 205 688	7 854 324	351 364	4.28
KOTAMADYA PROBOLINGGO		2 498 103	2 365 762	132 341	5.30
KOTAMADYA PASURUAN		2 144 634	2 007 824	136 810	6.38
KOTAMADYA MOJOKERTO		2 335 776	2 335 775	1	0.00
KOTAMADYA MADIUN		2 847 789	2 805 589	42 200	1.48
KOTAMADYA SURABAYA		42 781 639	36 784 724	5 996 915	14.02
		191 726 554	181 296 929	10 429 625	5.44

SELISIH ANTARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH OTONOM TINGKAT II SELURUH JAWA TIMUR
(Dalam Ribuan Rupiah)

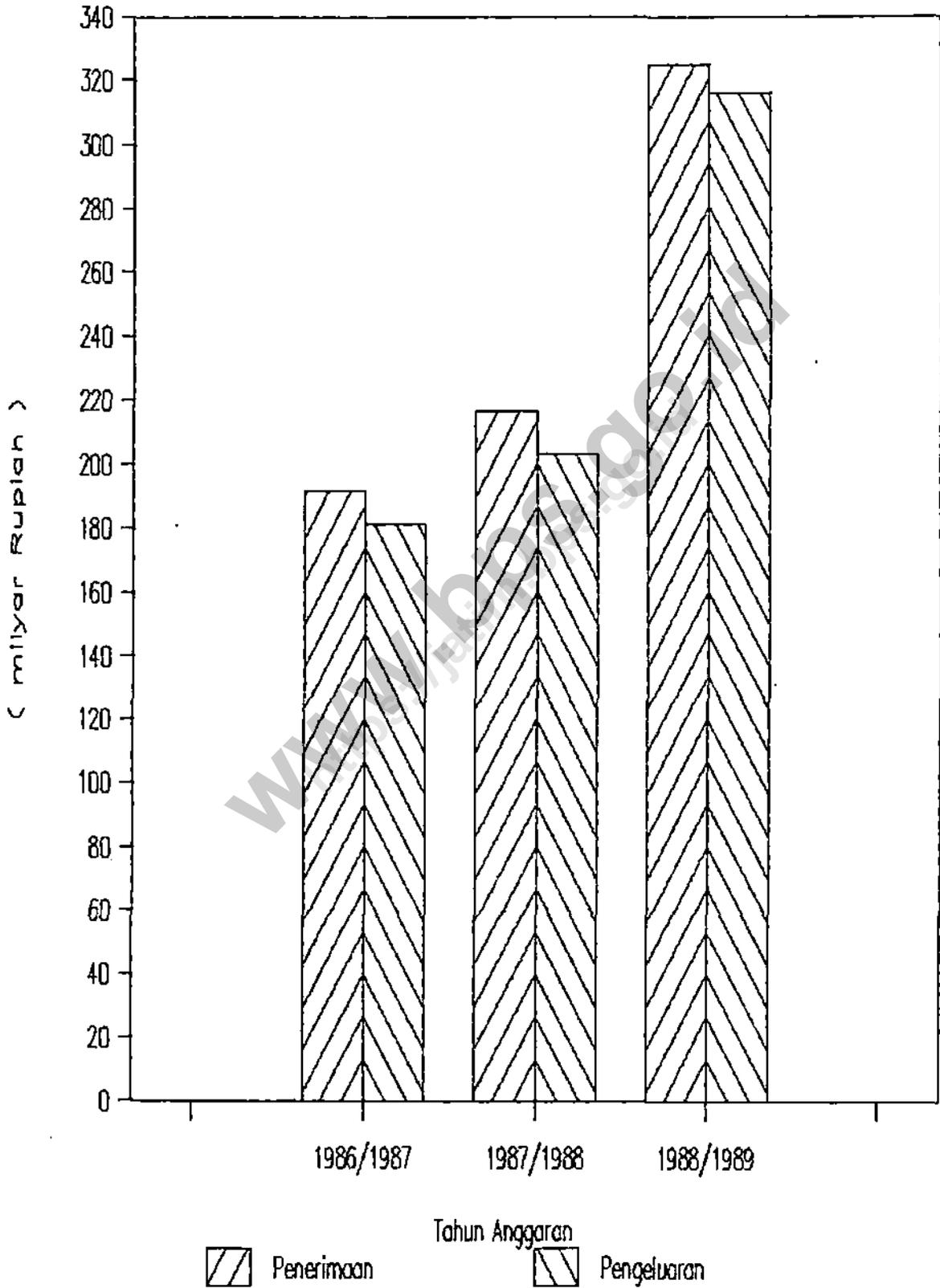
DAERAH TINGKAT II	TAHUN 1987/1988			
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	%
KABUPATEN PACITAN	3 652 514	3 642 509	10 005	0.27
KABUPATEN PONOROGO	3 761 132	3 676 477	84 655	2.25
KABUPATEN TRENGGALEK	2 911 112	2 887 015	24 097	0.83
KABUPATEN TULUNGAGUNG	3 945 711	3 920 190	25 521	0.65
KABUPATEN B L I T A R	4 006 558	3 887 030	119 528	2.98
KABUPATEN K E D I R I	5 607 871	5 397 150	210 721	3.76
KABUPATEN M A L A N G	7 765 902	7 732 051	33 851	0.44
KABUPATEN LUMAJANG	4 791 981	4 791 981	0	0.00
KABUPATEN J E M B E R	9 960 701	9 385 058	575 643	5.78
KABUPATEN BANYUWANGI	7 069 032	6 689 032	380 000	5.38
KABUPATEN BONDOWOSO	3 496 269	3 360 967	135 302	3.87
KABUPATEN SITUBONDO	3 554 710	3 479 686	75 024	2.11
KABUPATEN PROBOLINGGO	3 817 314	3 807 543	9 771	0.26
KABUPATEN PASURUAN	4 991 823	4 718 598	273 225	5.47
KABUPATEN SIDOARJO	7 694 057	7 037 112	656 945	8.54
KABUPATEN MOJOKERTO	3 027 308	2 897 250	130 058	4.30
KABUPATEN JOMBANG	4 399 662	4 111 653	288 009	6.55
KABUPATEN NGANJUK	4 578 836	4 414 391	164 445	3.59
KABUPATEN MADIUN	3 808 853	3 760 472	48 381	1.27
KABUPATEN MAGETAN	3 354 644	3 321 772	32 872	0.98
KABUPATEN N G A W I	5 355 769	4 012 775	1 342 994	25.08
KABUPATEN BOJONEGORO	3 411 593	3 299 240	112 353	3.29
KABUPATEN T U B A N	3 686 051	3 512 564	173 487	4.71
KABUPATEN LAMONGAN	6 524 075	3 380 675	3 143 400	48.18
KABUPATEN G R E S I K	11 045 877	10 016 104	1 029 773	9.32
KABUPATEN BANGKALAN	3 100 867	3 007 435	93 432	3.01
KABUPATEN SAMPANG	2 511 717	2 377 624	134 093	5.34
KABUPATEN PAMEKASAN	2 636 289	2 908 168	- 271 879	-10.31
KABUPATEN SUMENEP	4 493 712	4 399 419	94 293	2.10
KOTAMADYA K E D I R I	3 281 584	3 172 439	109 145	3.33
KOTAMADYA B L I T A R	1 998 978	1 983 750	15 228	0.76
KOTAMADYA M A L A N G	8 768 654	8 376 451	392 203	4.47
KOTAMADYA PROBOLINGGO	2 542 797	2 439 554	103 243	4.06
KOTAMADYA PASURUAN	2 117 395	2 094 917	22 478	1.06
KOTAMADYA MOJOKERTO	2 417 892	2 393 041	24 851	1.03
KOTAMADYA MADIUN	2 897 133	2 860 727	36 406	1.26
KOTAMADYA SURABAYA	53 760 780	50 474 315	3 286 465	6.11
	216 747 153	203 627 135	13 120 018	6.05

SELISIH ANTARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH OTONOM TINGKAT II SELURUH JAWA TIMUR
(Dalam Ribuan Rupiah)

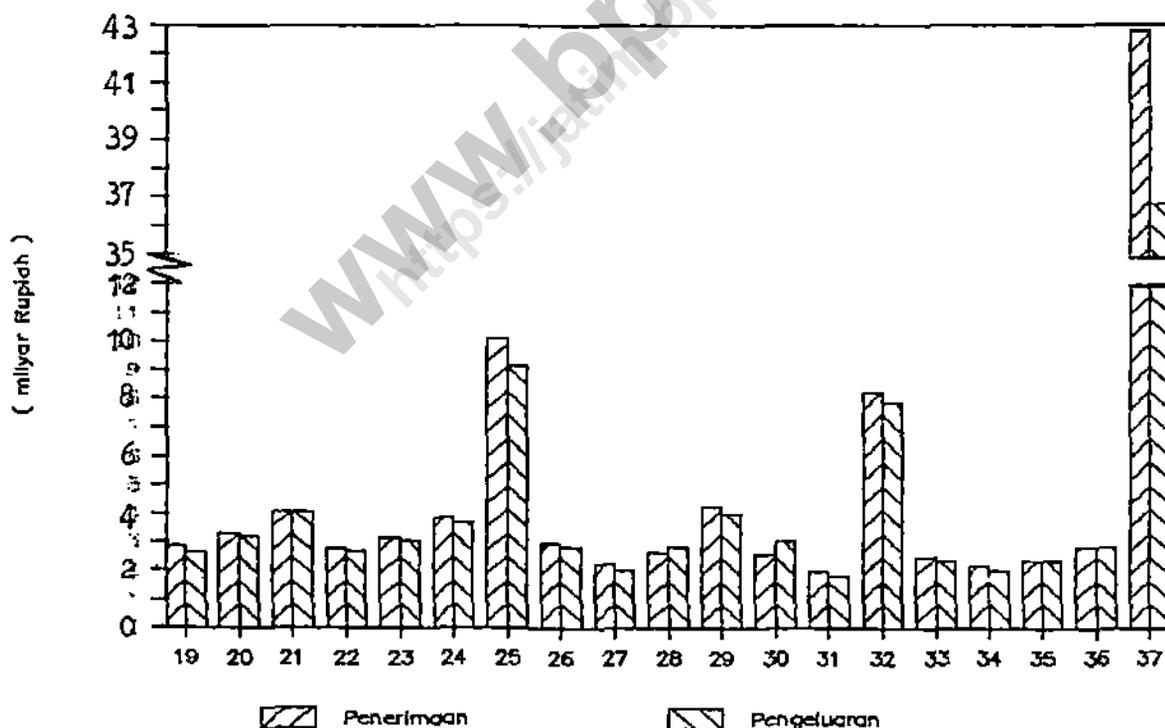
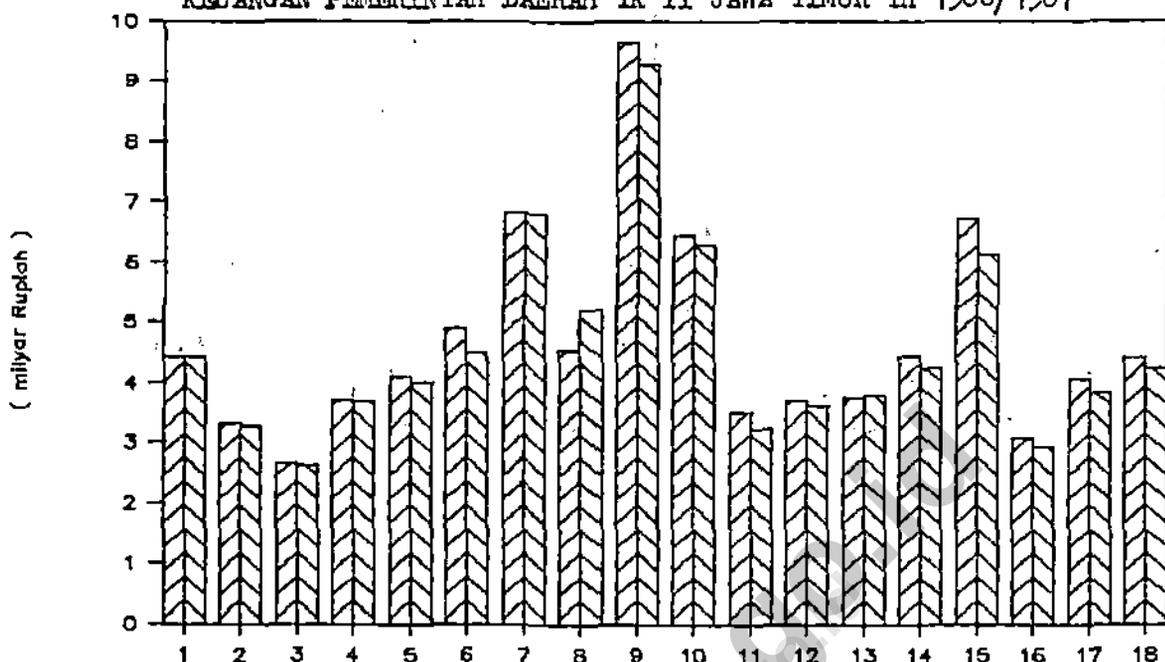
TAHUN 1988/1989				
DAERAH TINGKAT II	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SELISIH	%
KABUPATEN PACITAN	4 371 905	4 199 303	172 602	3.95
KABUPATEN PONOROGO	7 566 522	7 516 828	49 694	0.66
KABUPATEN TRENGGALEK	5 654 927	5 558 970	95 957	1.70
KABUPATEN TULUNGAGUNG	7 209 597	7 195 617	13 980	0.19
KABUPATEN B L I T A R	9 001 148	8 895 677	105 471	1.17
KABUPATEN K E D I R I	10 619 393	10 471 408	147 985	1.39
KABUPATEN M A L A N G	15 611 088	15 589 251	21 837	0.14
KABUPATEN LUMAJANG	7 754 433	7 628 183	126 250	1.63
KABUPATEN J E M B E R	16 195 200	16 128 141	67 059	0.41
KABUPATEN BANYUWANGI	11 856 059	11 613 425	242 634	2.05
KABUPATEN BONDOWOSO	5 629 460	5 334 052	295 408	5.25
KABUPATEN SITUBONDO	5 558 454	5 100 871	457 583	8.23
KABUPATEN PROBOLINGGO	6 202 705	6 690 305	- 487 600	-7.86
KABUPATEN PASURUAN	9 165 472	8 670 231	495 241	5.40
KABUPATEN SIDOARJO	12 905 247	11 697 686	1 207 561	9.36
KABUPATEN MOJOKERTO	6 327 210	5 586 554	740 656	11.71
KABUPATEN JOMBANG	8 249 990	7 965 643	284 347	3.45
KABUPATEN NGANJUK	7 319 070	7 166 830	152 240	2.08
KABUPATEN MADIUN	5 683 718	5 675 914	7 804	0.14
KABUPATEN MAGETAN	5 646 620	5 520 145	126 475	2.24
KABUPATEN N G A W I	7 773 924	7 776 688	-2 764	-0.04
KABUPATEN BOJONEGORO	7 975 105	7 452 555	522 550	6.55
KABUPATEN T U B A N	7 051 326	6 925 780	125 546	1.78
KABUPATEN LAMONGAN	8 144 920	7 993 618	151 302	1.86
KABUPATEN G R E S I K	8 799 311	8 256 165	543 146	6.17
KABUPATEN BANGKALAN	4 829 111	4 736 951	92 160	1.91
KABUPATEN SAMPANG	5 137 695	5 103 128	34 567	0.67
KABUPATEN PAMEKASAN	6 034 249	5 891 732	142 517	2.36
KABUPATEN SUMENEP	7 065 048	6 930 901	134 147	1.90
KOTAMADYA K E D I R I	4 146 218	4 098 059	48 159	1.16
KOTAMADYA B L I T A R	2 550 420	2 541 421	8 999	0.35
KOTAMADYA M A L A N G	11 611 636	11 328 648	282 988	2.44
KOTAMADYA PROBOLINGGO	3 404 953	3 290 961	113 992	3.35
KOTAMADYA PASURUAN	2 745 628	2 725 298	20 330	0.74
KOTAMADYA MOJOKERTO	3 259 591	3 238 359	21 232	0.65
KOTAMADYA MADIUN	3 851 713	3 826 292	25 421	0.66
KOTAMADYA SURABAYA	62 198 086	59 815 884	2 382 202	3.83
	325 107 152	316 137 474	8 969 678	2.76

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KEJANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SE
JAWA TIMUR TH 1986/1987 - 1988/1989



REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TK II JAWA TIMUR TH 1986/1987

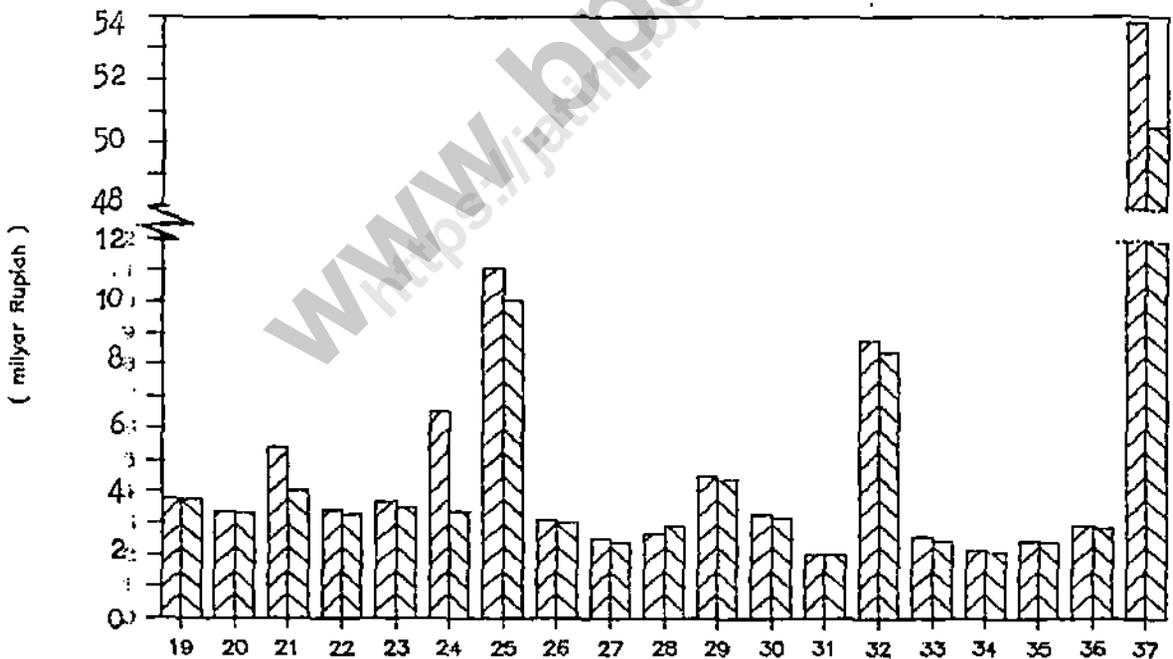
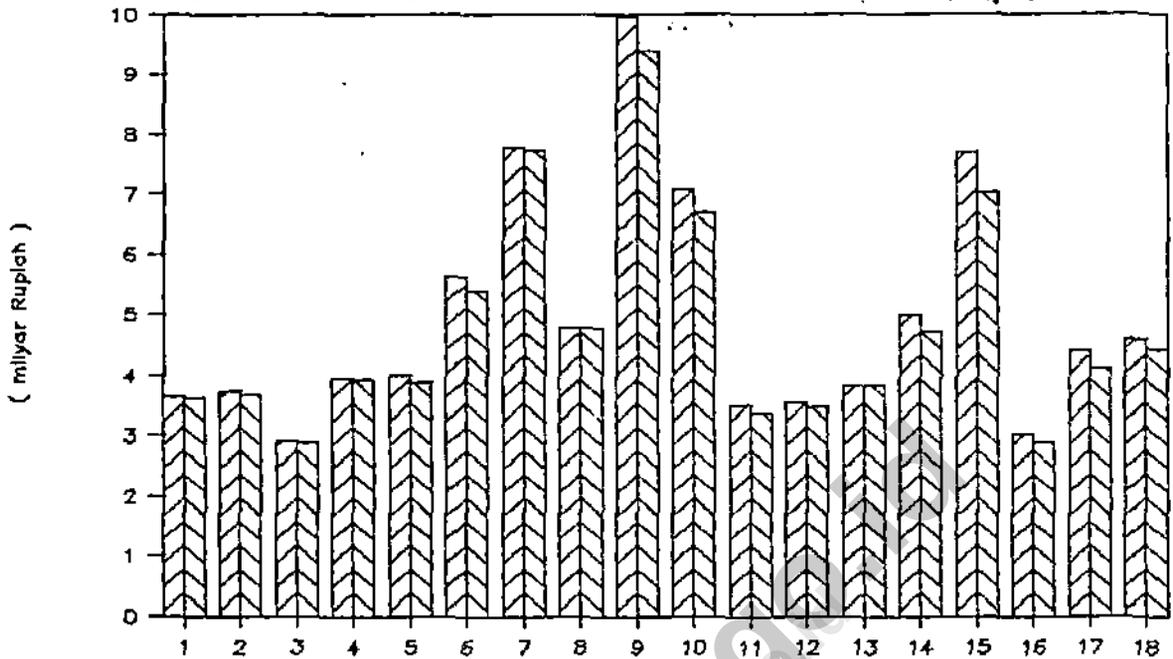


 Penerimaan
  Pengeluaran

Keterangan :

- | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Kabup. Pacitan | 9. Kabup. Jember | 16. Kabup. Mojokerto | 23. Kabup. Tuban | 30. Kodya. Kediri |
| 2. Kabup. Ponorogo | 10. Kabup. Banyuwangi | 17. Kabup. Jombang | 24. Kabup. Lamongan | 31. Kodya. Blitar |
| 3. Kabup. Trenggalek | 11. Kabup. Bondowoso | 18. Kabup. Nganjuk | 25. Kabup. Gresik | 32. Kodya. Malang |
| 4. Kabup. Tulungagung | 12. Kabup. Situbondo | 19. Kabup. Madiun | 26. Kabup. Bangkalan | 33. Kodya. Probolinggo |
| 5. Kabup. Blitar | 13. Kabup. Probolinggo | 20. Kabup. Magetan | 27. Kabup. Sampang | 34. Kodya. Pasuruan |
| 6. Kabup. Kediri | 14. Kabup. Pasuruan | 21. Kabup. Ngawi | 28. Kabup. Pamekasan | 35. Kodya. Mojokerto |
| 7. Kabup. Malang | 15. Kabup. Sidoarjo | 22. Kabup. Bojonegoro | 29. Kabup. Sumenep | 36. Kodya. Madiun |
| 8. Kabup. Lumajang | | | | 37. Kodya. Surabaya |

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TK II JAWA TIMUR TH 1987/1988



Keterangan :



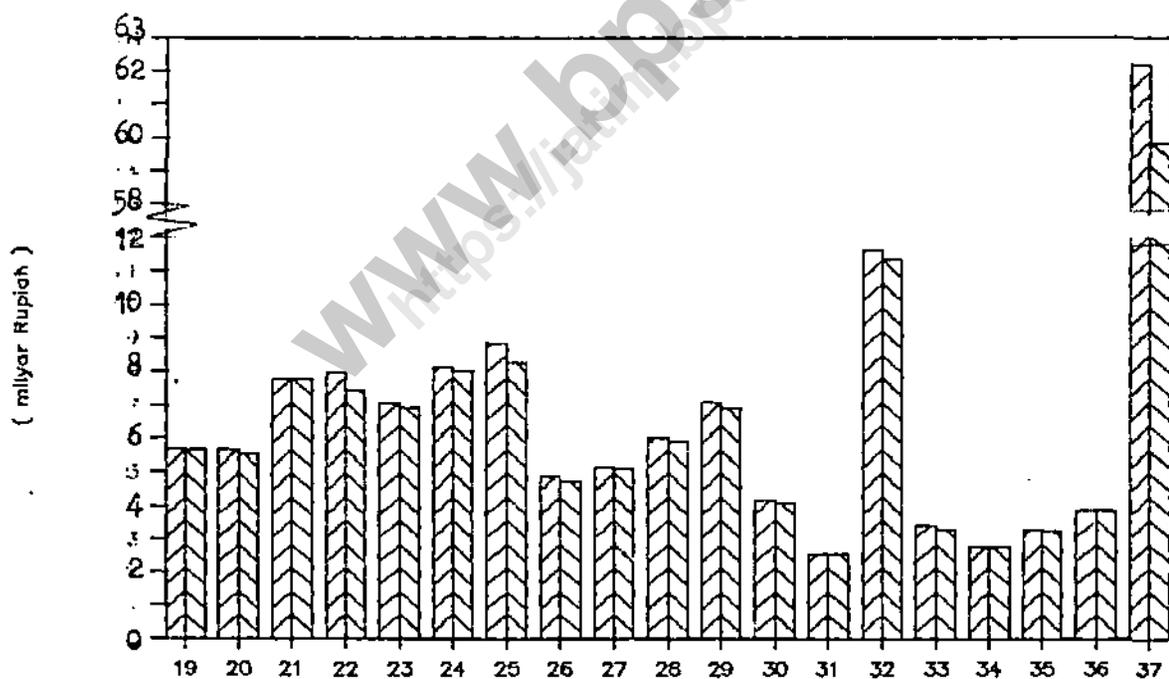
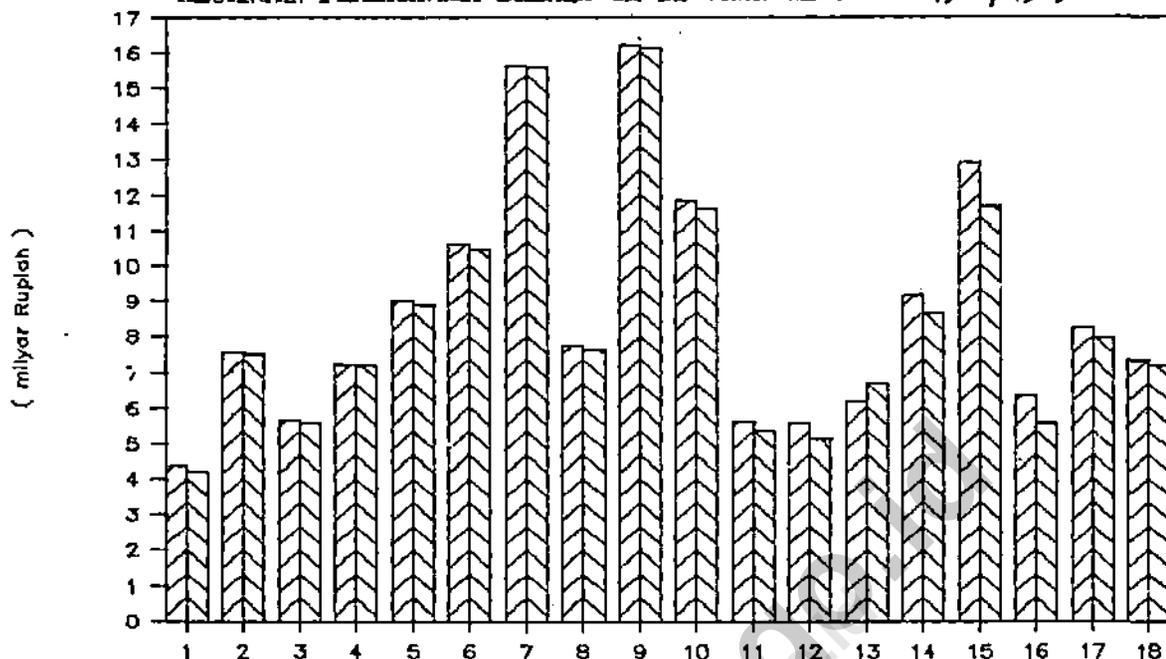
Penerimaan



Pengeluaran

- | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Kabup. Pacitan | 9. Kabup. Jeaber | 15. Kabup. Mojokerto | 23. Kabup. Tuban | 30. Kodya. Kediri |
| 2. Kabup. Ponorogo | 10. Kabup. Banyuwangi | 17. Kabup. Jombang | 24. Kabup. Lamongan | 31. Kodya. Blitar |
| 3. Kabup. Trenggalek | 11. Kabup. Bondowoso | 18. Kabup. Nganjuk | 25. Kabup. Gresik | 32. Kodya. Malang |
| 4. Kabup. Tulungagung | 12. Kabup. Situbondo | 19. Kabup. Madiun | 26. Kabup. Bangkalan | 33. Kodya. Probolinggo |
| 5. Kabup. Blitar | 13. Kabup. Probolinggo | 20. Kabup. Magetan | 27. Kabup. Saepang | 34. Kodya. Pasuruan |
| 6. Kabup. Kediri | 14. Kabup. Pasuruan | 21. Kabup. Ngawi | 28. Kabup. Pamekasan | 35. Kodya. Mojokerto |
| 7. Kabup. Malang | 15. Kabup. Sidoarjo | 22. Kabup. Bojonegoro | 29. Kabup. Suaenep | 36. Kodya. Madiun |
| 8. Kabup. Lumajang | | | | 37. Kodya. Surabaya |

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TK II JAWA TIMUR TH 1988/1989



Keterangan :

Penerimaan

Pengeluaran

- | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Kabup. Pacitan | 9. Kabup. Jember | 16. Kabup. Mojokerto | 23. Kabup. Tuban | 30. Kodya. Kediri |
| 2. Kabup. Ponorogo | 10. Kabup. Banyuwangi | 17. Kabup. Joebang | 24. Kabup. Lamongan | 31. Kodya. Blitar |
| 3. Kabup. Trenggalek | 11. Kabup. Bondowoso | 18. Kabup. Nganjuk | 25. Kabup. Gresik | 32. Kodya. Malang |
| 4. Kabup. Tulungagung | 12. Kabup. Situbendo | 19. Kabup. Madiun | 26. Kabup. Bangkalan | 33. Kodya. Probolinggo |
| 5. Kabup. Blitar | 13. Kabup. Probolinggo | 20. Kabup. Magetan | 27. Kabup. Sampang | 34. Kodya. Pasuruan |
| 6. Kabup. Kediri | 14. Kabup. Pasuruan | 21. Kabup. Ngawi | 28. Kabup. Pamekasan | 35. Kodya. Mojokerto |
| 7. Kabup. Malang | 15. Kabup. Sidoarjo | 22. Kabup. Bojonegoro | 29. Kabup. Sumanep | 36. Kodya. Madiun |
| 8. Kabup. Lugajang | | | | 37. Kodya. Surabaya |